PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KAMPUNG BUGIS KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

SOIFAH

NIM : 100565201198

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA HAJI

TANJUNGPINANG

2015

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KAMPUNG BUGIS KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014

SOIFAH
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH

A B S T R A K

Untuk mencegah agar polarisasi sosial-ekonomi dan konflik antar nelayan modern dengan nelayan tradisional tidak kian meluas, saat ini dibutuhkan adalah strategi pembangunan dan pemberdayaan komonitas nelayan miskin yang benar-bener efektif. Oleh karena itu, perlu adanya kesiapan perangkat-perangkat tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia perikanan yang berkualitas, sarana dan prasarana perikanan yang memadai serta kelembagaan atau organisasi masyarakat yang mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah sendiri, sebetulnya bukan tidak memahami penderitaan dan tekanan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan, khususnya para nelayan tradisional.

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang dan untuk melihat kendala maupun hambatan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, dalam penelitian ini informan terdiri dari 7 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sudah terlaksananya dengan baik program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Fakta ini terlihat dari lima dimensi yang disajikan empat dimensi yaitu penciptaan lapangan kerja, modal dan peningkatan potensi, mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta solidaritas semua sudah berjalan dengan baik. Saran yang diberikan, sehubungan penelitian yang dilakukan, yaitu Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebelum mensosialisakan kepada nelayan tentang pendekatan teknologi baru seharusnya terlebih dahulu harus lebih menguasai seperti dalam penggunaan serta tata cara penggunaan peralatan seperti GPS tersebut agar arahan yang diberikan juga dapat dengan mudah dipahami oleh para nelayan. Para nelayan seharusnya lebih sering diberikan sosialisasi atau pemahaman terhadap bantuan yang diberikan seperti sarana dan prasarana yang dapat menunjang pekerjaannya sehingga bantuan yang telah diberikan dapat digunakan secara efektif.

Kata Kunci : Nelayan, Pemberdayaan masyarakat

A B S T R A C T

In order to prevent socio-economic polarization and conflict between modern fishermen with traditional fishermen are increasingly widespread, is now needed is a strategy development and empowerment of the poor fishermen and correct komonitas-Ko effective. Therefore, the need for readiness of these devices include the availability of human resources quality fisheries, infrastructure adequate fisheries and institutional or community organization that supports the development of marine and fisheries sector. The government itself, in fact it is not understand the suffering and poverty pressures experienced by fishing communities, especially the traditional fishermen.

The purpose of this research is essentially to determine Bugis Village Community Empowerment Fishermen Tanjungpinang and to see obstacles and barriers that occur in the fishing community empowerment by the Department of Marine and Fisheries Tanjungpinang. In this study, the authors use a type of qualitative descriptive study informants in this study consisted of 7 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques.

The conclusion of this research is already fulfilled by both Community Empowerment program Bugis Village Fishermen Tanjungpinang. This fact can be seen from the five dimensions presented four dimensions of job creation, capital and increase the potential, the community closer to the market, as well as the solidarity of all has been going well. Advice given, in respect of research conducted, namely the Department of Marine and Fisheries Party Tanjungpinang before publicizes the fishermen on the approach to the new technologies should first have to be mastered as in use as well as procedures for the use of equipment such as GPS so that the direction given can also easily understood by the fishermen. The fishermen should be given more frequently socialize or understanding of the assistance provided such facilities and infrastructure that can support their work so that the assistance given can be used effectively.

Keywords: Fishermen, community empowerment

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KAMPUNG BUGIS KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014

A. Latar Belakang

Sejak krisis ekonomi mulai merambah keberbagai wilayah, nelayan tradisional dapat dikatakan sebagai kelompok masyarakat pesisir yang paling kuat merasakan dampak buruknya dan merupakan korban dari perubahan situasi sosial ekonomi. Dapat dibayangkan bagaimana nelayan tradisional untuk bertahan dan melangsungkan kehidupanya, jika dari hari ke hari potensi ikan diluar semakin langka karena cara penangkapan hanya mengandalkan pada perahu dan alat tangkap ikan yang sederhana yang tidak mampu bersaing dengan nelayan modern yang didukung perangkat serba canggih seperti pukat udang, pukat kantong, pukat cincin, jaring insang, dan jaring angkat dan kapal besar yang memiliki daya jangkau jauh dan lebih luas. Sedangkan masyarakat pesisir pantai lebih sering menggunakan alat tradisional seperti alat pancing, bubu, bahkan tombak.

Bagi nelayan tradisional, musim hujan yang panjang dan angin utara bukan saja sama dengan memperlama masa kesulitan mereka dalam memperoleh hasil tangkapan, tetapi juga menyebabkan mereka makin miskin, dan mereka terpaksa masuk dalam perangkap hutang yang tidak berkesudahan. Keterbatasan berupa fasilitas kapal yang memadai selama ini nelayan menggunakan kapal kecil seharusnya para nelayan memiliki ukuran kapal yang besar dan aman ketika nelayan turun kelaut dalam cuaca yang tidak baik sekalipun, peralatan tangkap yang memadai seperti jaring angkut agar nelayan dapat menangkap ikan lebih banyak daripada hanya menggunakan alat pancing, adalah hambatan pontensi bagi

mereka untuk meningkatkan kesejahtraan sosial dan mengatasi kemiskinan yang membelit mereka selama ini.

Kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional, selain dipengaruhi sejumlah kelemahan internal, juga karena faktor eksternal. Keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih moderen dan tidak dimiliki oleh modal yang cukup adalah faktor-faktor internal yang sering kali menyulitkan usaha-usaha untuk memberdayakan kehidupan para nelayan tradisional. Di lain pihak, ada sejumlah faktor eksternal, seperti makin terbatasnya pontensi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan dihadapan tangkulak, keadaan infrastuktur pelabuhan perikanan, dan yurisdikasi daerah otonomi adalah beban tambahan yang makin memperarah keadaan.

Tanggung jawab pemerintahan di daerah dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat semakin kompleks, dimana selain bertanggung jawab memberikan pelayanan dan pembangunan, pemerintah daerah juga harus aktif untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbagai aspek terutama aspek ekonomi, sehingga diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang secara mandiri dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, pemberdayaan yang dilaksanakan perlu diarahkan dengan memperhatikan segala aspek kehidupan

terutama perekonomian rakyat, terutama yang berada di daerah, meliputi wilayah kecamatan maupun pedesaan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Jadi pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu aspek yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan dewasa ini, yang mana perekonomian rakyat merupakan indikator keberhasilan pembangunan serta menjadi sasaran penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan di bidang lainnya. Perekonomian rakyat yang kuat dan tangguh dengan sendirinya tentu akan menjadi salah satu penunjang perekonomian daerah dan bahkan perekonomian nasional, maka sudah selayaknya pemerintah menyusun dan menerapkan suatu kebijakan yang dapat mengembangkan berbagai sektor usaha bagi masyarakat.

Diantara upaya yang telah dan sedang giatnya dilakukan pemerintah dalam rangka memberdayakan perekonomian rakyat adalah pengelolaan sektor perikanan. Hal ini mengingat bahwa sektor perikanan selain dapat berfungsi

sebagai mata pencaharian masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat juga dapat memanfaatkan sumberdaya alam kelautan, yang mana perairan adalah bagian terbesar wilayah di nusantara. Dengan demikian, diantara lapisan masyarakat yang perlu mendapat perhatian khususnya pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat pesisir dengan memberdayakan perekonomiannya. Masyarakat yang tinggal pesisir pantai di wilayah nusantara merupakan salah satu kelompok masyarakat terbesar mengingat bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, yang mana pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk mencegah agar polarisasi sosial-ekonomi dan konflik antar nelayan modern dengan nelayan tradisional tidak kian meluas, saat ini dibutuhkan adalah strategi pembangunan dan pemberdayaan komunitas nelayan miskin dan benar-bener efektif. Oleh karena itu, perlu adanya kesiapan perangkat-perangkat tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia perikanan yang berkualitas, sarana dan prasarana perikanan yang memadai serta kelembagaan atau organisasi masyarakat yang mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah sendiri, sebetulnya bukan tidak memahami penderitaan dan tekanan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat nelayan, khususnya para nelayan tradisional.

Salah satu program pembangunan yang dirancang khususnya untuk membantu upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan adalah PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir). Program

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Penanggung jawab dan pembina program di tingkat nasional adalah Direktur Jenderal kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Dirjen KP3K), Sedangkan Dinas kelautan dan perikanan kabupaten/Propinsi sebagai penanggung jawab operasional program.

Kegiatan PEMP diresmikan untuk mengatasi berbagai permasalahan akibat krisis ekonomi, kenaikan BBM, kesenjangan, kemiskinan, dan rendahnya kapasitas sumberdaya manusia (masyarakat) pesisir serta upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tujuan umum dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan kelembagaan, penggalangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan usaha yang berkelanjutan dan berbasis sumber daya lokal. Dengan adanya program PEMP ini diharapakan dapat terjadi peningkatan kualitatif berupa peningkatan budaya berkelompok, kesadaran menjaga kualitas dan sumber daya ikan berupa kesepakatan melarang kegiatan penangkapan yang bersifat merusak (penggunaan potasium dan bom), peningkatan budaya menabung dan berkurangnya penyakit sosial (seperti mabuk, judi, dan sebagainya).

Melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.18 Tahun 2004 bahwa sasaran Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) adalah nelayan tradisional, nelayan buruh, pedagang, pengelolaan ikan berskala

kecil, pembudidayaan ikan bersekala kecil, dan pengelola sarana penunjang usaha perikanan berskala kecil, yang mana mereka semua adalah termasuk kelompok sosial masyarakat nelayan yang memiliki kerentangan ekonomi. Pelaksanaan dari Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang telah dilaksanakan 7 tahun terakhir meliputi kegiatan pendampingan Tenaga Teknis Perikanan, Bantuan Sarana Perikanan Tangkap, Peningkatan Sarana CCS *(cold chain system)* untuk peningkatan mutu hasil perikanan.

Untuk itu Pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan perannya dalam pembangunan yang mengarahkan pada pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Hal ini dimaksud agar sektor kelautan dan perikanan yang selama ini tertinggal, diharapkan mampu bersaing serta mensejajarkan dengan sektor-sektor lainya. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan perangkat-perangkat tersebut meliputi ketersediaan sumber daya manusia perikanan yang berkualitas sarana dan prasarana perikanan yang memadai serta kelembagaan atau organisasi masyarakat yang mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, dituntut untuk mampu mengembangkan sektor tersebut dan meningkatkan produksi ikan baik dari penangkapan maupun pembudidayaan ikan. Jumlah nelayan di Kota Tanjungpinang saat ini yang menjadi nelayan penuh 3489 orang, nelayan sampingan utama 774 orang, serta nelayan tambahan 358 orang.

Pada Kampung Bugis dari kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir ada beberapa pencapaian dari program pemberdayaan tersebut, berupa tersalurkannya bantuan alat-alat tangkap ikan kepada masyarakat, pemberian bibit rumput laut untuk dibudidaya, dan penyediaan modal pinjaman yang bernaung

dibawah koperasi melalui Swamitra maupun Bank Perkreditan Rakyat. Dan hal-hal yang belum dapat dicapai dari program pemberdayaan masyarakat nelayan di Kampung Bugis adalah nelayan belum memahami dari kegunaan maupun perawatan dari alat-alat tangkap yang diberikan kepada mereka, kurangnya keterampilan mengenai usaha perikanan dan budi daya rumput laut, serta tingkat kesadaran solidaritas antar nelayan dalam penggunaan modal yang tidak teratur dalam arti nelayan-nelayan yang tergabung dalam satu kelompok Swamitra Mina ada yang tidak mematuhi aturan yang telah disepakati.

Berdasarkan pengamatan sementara peneliti dilapangan pada masyarakat Kampung Bugis ditemukannya beberapa gejala, seperti : Masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan pada umumnya masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana dan kurang memadai dalam melakukan aktivitasnya akibat terbatasnya modal maupun teknologi yang dimiliki, seperti sampan dan kapal motor dan peralatan penangkapan ikan seperti pancing, rawai, bubu, jaring, dan lain sebagainya, masih kurang memadai baik dari jumlahnya maupun kondisi peralatannya. Bantuan yang diberikan pemerintah melalui kebijakan pemberdayaan masyarakat yang diterapkannya berupa sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan tangkap seperti perahu, kapal motor dan peralatan penangkapan ikan antara lain jaring, pancing, bubu dan rawai, masih mencapai sebahagian kecil nelayan yang ada. Terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidang perikanan yang sangat dibutuhkan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang pengelolaan usaha perikanan, dimana tenaga penyuluh dan pelatihan tentang pengelolaan usaha perikanan, dimana tenaga

penyuluh lapangan yang tersedia relatif sedikit yaitu hanya 2 orang dibandingkan dengan jumlah nelayan dan luas daerah yang ada. Akibat dari keterbatasan modal dan fasilitas yang dimiliki serta sumber daya manusia yang ahli dan terampil dibidang perikanan, maka hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan belum mencapai hasil yang maksimal sehingga tidak dapat memberikan keuntungan yang memadai di tambah lagi kadang-kadang karena cuaca buruk yang menghambat aktivitas penangkapan ikan di laut, serta rendahnya harga ikan hasil tangkapan di pasaran.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan pemerintah adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ekonomi partisipatif yang mampu memberikan akses yang fair dan adil bagi sebuah lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan memanfaatkan potensi daerah tanpa ada hambatan. Oleh sebab itu, sangat diperlukan peran pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini melalui kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi, sehingga masyarakat nelayan yang ada di daerah tersebut khususnya maupun masyarakat pada umumnya dapat meningkatkan perekonomiannya di masa mendatang. Berdasarkan uraian diatas, dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dan menyusun dalam satu usulan penelitian dengan judul: **"PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN KAMPUNG BUGIS KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2014".**

B. Landasan Teoritis

Nelayan, khususnya yang tradisional, mempunyai perilaku yang khas dalam menjalankan usahanya, yakni perilaku yang mengutamakan "pemerataan resiko" usaha. Perilaku tersebut terbentuk sebagai hasil adaptasi terhadap usaha penangkapan ikan yang beresiko tinggi dan pola pendapatan yang tidak teratur. Perilaku adaptif tersebut, setelah melalui proses waktu, melembaga dalam bentuk institusi, dan merupakan bagian dari kebudayaan nelayan. Institusi-institusi yang dimaksud, yang merupakan aspek penting dalam pemberdayaan, adalah pola pemilikan kelompok atas sarana produksi dan sistem bagi hasil. Pola pendapatan nelayan tidak teratur menyebabkan perilaku mengutamakan pemerataan resiko tetap bertahan (Masyhuri, 2000: 29).

Berbagai program, proyek dan kegiatan telah dilakukan untuk mengentaskan nelayan dari kemiskinan. Namun ternyata jumlah nelayan kecil tetap bertambah. Karena itu meskipun banyak upaya yang dilakukan, umunya upaya-upaya tersebut bisa dikatakan belum memperoleh hasil yang memuaskan. Lebih lanjut Nijikuluw (2001:8) pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yaitu :

1. Penciptaan lapangan kerja altervatif sebagai sumber pandapatan lain bagi keluarga. Penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi nelayan dilaksanakan untuk mengalihkan profesi nelayan atau sebagai tambahan pendapatan. Dengan kata lain, program diversifikasi pendapatan nelayan tidak hanya diarahkan untuk nelayan, tetapi juga bagi keluarga nelayan seperti istri atau perempuan nelayan yang memang besar potensinya. Pengembangan pekerjaan alternatif bukan hanya dalam bidang perikanan,

seperti pengolahan, pemasaran, atau budidaya ikan, akan tetapi juga diarahkan ke kegiatan non-perikanan.

2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri. Pengembangan akses modal sangat penting karena pada dasarnya saat ini nelayan sangat sulit untuk memperoleh modal. Sifat bisnis perikanan yang musiman, ketidakpastian serta risiko tinggi sering menjadi alasan keengganan bank menyediakan modal bagi bisnis ini. Sifat bisnis perikanan seperti ini yang disertai dengan status nelayan yang umumnya rendah dan tidak mampu secara ekonomi membuat mereka sulit untuk memahami syarat-syarat perbankan yang selayaknya diberlakukan seperti adanya jaminan. Dengan memperhatikan kesulitan yang dihadapi oleh nelayan akan modal, maka salah satu alternatif adalah mengembangkan mekanisme pendanaan diri sendiri *(self-financing mechenism).*
3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna. Teknologi yang digunakan oleh nelayan pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Upaya peningkatan pendapatan dilakukan melalui perbaikan teknologi, mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran.
4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar. Untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh nelayan, maka upaya yang dilakukan adalah pendekatan masyarakat dengan perusahaan-perusahaan besar seperti eksportir komoditas perikanan. Keuntungan dari hubungan ini adalah nelayan

mendapatkan jaminan pasar dan harga, pembinaan terhadap kualitas barang serta sering nelayan mendapat bantuan modal untuk pengembangan usaha.

5. Membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Pengembangan aksi kolektif sama artinya dengan pengembangan koperasi atau kelompok usaha bersama. Aksi kolektif dilakukan untuk membuka kesempatan kepada nelayan membentuk kelompok-kelompok yang diinginkan tidak semata-mata koperasi atau kelompok bersama. Aksi kolektif merupakan aksi bersama yang bermuara pada kesejahteraan setiap anggota secara individu.

C. Hasil Penelitian

1. Penciptaan Lapangan Kerja Altervative Sebagai Sumber Pandapatan Lain Bagi Keluarga.

Bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sudah diberikan kepada masyarakat nelayan yang mana pihak dinas memberikan bantuan berupa pompong dan bibit ikan serta rumput laut. Pemberian sarana dan prasarana dari pemerintah kepada masyarakat sangatlah membantu masyarakat untuk dapat bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dalam hal ini sangatlah penting bagi masyarakat nelayan itu sendiri, dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah maka akan mempermudah masyarakat nelayan untuk melaut dan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri.

Pemerintah telah menyediakan dana bantuan kepada masyarakat nelayan yang sangat membantu masyarakat untuk membuat usaha budidaya perikanan serta industri lainnya dan juga pihak dinas mengarahkan kepada masyarakat yang ingin membuat modal usaha dengan membutuhkan pinjaman kepada pihak koperasi yang mana masyarakat dapat melangsungkan kegiatan industri di bidang perikanan dn kelautan yang dapat membangun ekonomi maysarakat. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sudah memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas produksi. hal ini juga dapat dilihat dengan bantuan pemerintah terhadap sarana dan prasarana yang ada dan juga dengan bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat nelayan.

3. Mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna.

Peralatan dengan teknologi baru sudah disosialisasikan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat akan tetapi kurangnya sumber daya merupakan hambatan dalam pelaksanannya yang mana masyarakat nelayan menjadi tidak menguasai penggunaan perlatan yang telah di sediakan. Pemberdayaan masyarakat nelayan melalui penggunaan peralatan teknologi sangatlah penting untuk dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat nelayan dalam bekerja dengan menggunakan teknologi yang canggih.

4. Mendekatkan masyarakat dengan pasar.

Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberikan arahan serta bimbingan kepada masyarakat tentang tata cara pengemasan hasil produksi dan pemasaran yang baik. hal ini merupakan salah satu bentuk pemberdayaaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Bugis yang mana di dominasi oleh para nelayan kemudian kegiatan promosi sepenuhnya dilakukan oleh pihak masyarakat sendiri, pihak dinas hanya membantu untuk memberikan pengarahan serta tata cara memproduksikan hasil produksi yang sudah dihasilkan. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan juga dapat dibantu dengan dilakukannya kegiatan promosi oleh pihak dinas yang nantinya dapat membantu meningkatkan hasil jual dari produksi yang dilakukan serta dapat juga membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya.

5. Membangun solidaritas.

pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka membangun kedekatan antara nelayan selama ini berjalan dengan baik. Pertemuan rutin yang dilakukan sebulan sekali mampu membangun kedekatan tersebut. Karena dari pertemuan para nelayan dapat bertukar fikiran, menyampaikan keluhan dan langsung ditanggapi oleh pihak DKP Kota Tanjungpinang.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sudah terlaksananya dengan baik program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kampung Bugis Kota Tanjungpinang. Fakta ini terlihat dari lima dimensi yang disajikan empat dimensi yaitu penciptaan lapangan kerja, modal dan peningkatan potensi, mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta solidaritas semua sudah berjalan dengan baik.

Pada dimensi penciptaan lapangan kerja dengan dua indikator yaitu penyediaan sarana, prasarana dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa sudah tersedianya sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang untuk nelayan pada Kampung Bugis sangat membantu masyarakat bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tentunya pemberdayaan yang diberikan berupa sarana dan prasarana ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir pada Kampung Bugis. Kemudian dengan indikator kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis yang dilakukan juga sudah dapat memberdayakan masyarakat nelayan ini dapat dilihat dari untuk peralatan dengan teknologi baru sudah disosialisasikan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan kepada masyarakat akan tetapi kurangnya sumber daya merupakan hambatan dalam pelaksanannya yang mana masyarakat nelayan menjadi tidak menguasai penggunaan peralatan yang telah di sediakan.

Dimensi kedua yaitu mendekatkan masyarakat dengan sumber modal juga sudah berjalan dengan baik. ini dapat dilihat dari indikator pertama yaitu

penyediaan sumber daya keuangan sudah dilaksanakan dengan memberikan pinjaman kepada para nelayan. Indikator kedua yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sudah memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas produksi usaha masyarakat nelayan hal ini juga dapat dilihat dengan bantuan pemerintah terhadap sarana dan prasarana yang ada dan juga dengan bantuan dana yang diberikan kepada masyarakat nelayan.

Dimensi ketiga belum dapat berjalan dengan baik,yaitu dinas kelautan dan perikanan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap teknologi baru sudah dilaksanakan dengan diadakannya sosialisasi, namun hal ini belum berjalan efektif dikarenakan kurangnya sumber daya yang handal dalam memberikan arahan kepada masyarakat itu sendiri tentang tata cara penggunaan peralatan seperti GPS tersebut.

Dimensi keempat dan kelima yaitu mendekatkan masyarakat dengan pasar serta solidaritas sudah berjalan dengan baik. ini dapat dilihat dari dua indikator dari mendekatkan masyarakat dengan berjalan keduanya sudah menunjukan kearah yang baik dan mampu memberdayakan masyarakat nelayan. bahwa pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan telah memberikan arahan serta bimbingan kepada masyarakat tentang tata cara pengemasan hasil produksi dan pemasaran yang baik. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan juga dapat dibantu dengan dlakukannya kegiatan promosi oleh pihak dinas dapat membantu meningkatkan hasil jual dari produksi yang dilakukan serta dapat juga membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya.

2.Saran

Saran yang diberikan, sehubungan penelitian yang dilakukan, yaitu :

a. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebelum mensosialisakan kepada nelayan tentang pendekatan pada teknologi baru seharusnya terlebih dahulu harus lebih menguasai seperti dalam penggunaan serta tata cara penggunaan peralatan seperti GPS tersebut agar arahan yang diberikan juga dapat dengan mudah dipahami oleh para nelayan.

b. Para nelayan seharusnya lebih sering diberikan sosialisasi atau pemahaman terhadap bantuan yang diberikan seperti sarana dan prasarana yang dapat menunjang pekerjaannya sehingga bantuan yang telah diberikan dapat digunakan secara efektif.

c. Seharusnya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan juga menyediakan fasilitas untuk para nelayan menyampaikan keluhan-keluhannya agar keluhan tersebut tidak menjadi masalah bagi para nelayan saat bekerja. dan tidak perlu menunggu waktu sebulan karena sebulan adalah waktu yang cukup lama untuk para nelayan menyampaikan aspirasi, atau keluhan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 2002.Sosiologi Skematika,Teori, Dan Terapan. Jakarta: PT Bumi Aksara

Arikunto, Suharsami. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Penerbit: Rineka Cipta.

Friedmann, John, 1992. "Kemiskinan Urban di Amerika Latin", dalam Andre Bayo Ala (ed)., Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Liberti: Yogyakarta.

Ife, J.W. 1996. Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice: Longman. Australia.

Kusnadi, 2002. *Konflik sosial nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan.* Penerbit: LkiS Yogyakarta.

Labolo, Muhadam.2005. *Memahami Ilmu Pemerintahan.* Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Meleong, Lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosda Karya

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru, Jilid I.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Nijikuluw, Viktor PH. 2001. *Populasi dan Sosial ekonomi masyarakat pesisir serta strategi pemberdayaan mereka dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu*. Bogor : IPB

Pambudi, Himawan S. dkk, Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan. Otonomi Desa, Yogyakarta, LAPPERA Pustaka Utama

Purwanti, Pudji P. 2010. *Model Ekonomi Rumah Tangga Nelayan Sekala Kecil. Malang*. Penerbit: Universitas Brawijaya Press.

Priyono, O.S. & A.M.W. Pranarka, 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Rr.Suhartini, Ahalim, dan Imam Khambali. 2009. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta. Penerbit: PT LkiS Printing Cemerlang.

Satria, Arif. 2002. *Pengantar sosiologi Masyarakat Pesisir.* Jakarta : Cidesindo

Sedarmayanti, 2004, Good *Governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Slamet, M. 2003. Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Membetuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat.* Jakarta : Citra Utama

Syarief, Efrizal. 2008. *Pembangunan kelautan dalam konteks pemberdayaan masyarakat pesisir.* Makasar : Bappenas

Syafiie, Inu Kencana. 2011, Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama.

Tjandraningsih, Indrasari, 1996. "Beberapa Catatan Pemberdayaan Buruh Anak" dalam Surya Mulandar :Dehumanisasi Anak Marginal, Berbagai Pengalaman Pemberdayaan. Kerjasama Yayasan Akatiga di Gugus Analisis. Bandung

Vidhyandika. 1996. Pemberdayaan (Empowerment). Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS).

Winardi. 2004. Manajemen Perilaku Organisasi, Jakarta : Pranada Media.

DOKUMEN:

Keputusan Mentri Kelautan dan Perikanan nomor 18 Tahun 2004 *Tentang Sasaran Program Pemberdayaan Ekonomi Pantai (PEMP)*